

**Analisis Sebab Dan Implikasi Yuridis Terjadinya Tumpang Tindih
Sertipikat Hak Milik
(Studi Putusan Nomor : 562 K/TUN/2014)**

Oleh :

Ody Dwi Wiguna¹ dan Sudjito²

INTISARI

Penelitian ini memiliki tujuan baik secara subyektif maupun secara obyektif yaitu untuk mengetahui dan mengkaji apa yang menjadi sebab dan implikasi yuridis terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik (studi putusan nomor : 562 K/TUN/2014).

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum Normatif. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan melakukan penelitian dengan proses wawancara secara langsung dengan responden dan narasumber. yang berkaitan dengan penyampaian analisis sebab dan implikasi yuridis terjadinya tumpang tindih sertipikat hak milik (studi putusan nomor : 562 K/TUN/2014).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa BPN dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas kecermatan yang mana tergugat seharusnya cermat dalam memeriksa data-data yang ada padanya terkait bidang-bidang tanah yang berada dalam wilayah hukumnya. Apabila sejak awal tergugat cermat, maka seharusnya diketahui di atas bidang tanah yang dimohonkan sertipikat hak terdapat sebagian bidang tanah hak milik orang lain (Para Penggugat). Implikasi yuridis atau akibat hukum yang timbul adanya tumpang tindih sertipikat ini yaitu bertentangan dengan prinsip memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria Nomor : 5 Tahun 1960. Bahwa tindakan tergugat dengan menerbitkan hak baru berupa Sertipikat Hak Milik No.267 atas nama Imam Solikin merupakan tindakan dan sikap inkonsistensi tergugat yang jelas-jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Kata kunci : Tumpang Tindih Sertipikat , Penyebab Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat,
Implikasi Yuridis Terjadinya Tumpang Tindih Sertipikat.

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Analysis of Juridical Causes and Implications of Overlapping Freehold Certificate

(Decision Study Number: 562 K/TUN/2014)

By :

Ody Dwi Wiguna³ dan Sudjito⁴

ABSTRACT

This research has objectives both subjectively and objectively, namely to find out and examine what are the causes and juridical implications of overlapping property rights certificates (study of decision number: 562 K/TUN/2014).

This research is a type of normative legal research. This research was conducted by analyzing a court decision that has permanent legal force and conducting research by direct interviews with respondents and informants. relating to the submission of an analysis of the causes and juridical implications of overlapping ownership certificates (study of the decision number: 562 K/TUN/2014).

Based on the research results, it can be concluded that BPN in issuing disputed objects has violated the general principles of good governance, namely the principle of accuracy in which the Defendant should be careful in examining the data available to him regarding land parcels within his jurisdiction. If from the start the Defendant had been careful, then it should have been known that on the land parcel for which the certificate of title was being applied for there was part of the land parcel owned by other people (Plaintiffs). The juridical implications or legal consequences arising from the overlapping of these certificates are contrary to the principle of obtaining legal certainty and certainty of land rights as referred to in Article 19 paragraph (1) of the Basic Agrarian Law Number: 5 of 1960. That the actions of the defendant by issuing the new right in the form of Property Rights Certificate No. 267 in the name of Imam Solikin is an inconsistent action and attitude of the defendant which is clearly an action that is contrary to the applicable laws and regulations and violates the General Principles of Good Governance (AAUPB).

Keyword : Overlapping Certificates, Causes of Overlapping Certificates, Juridical Implications of Overlapping Certificates

³ Student of Magister of Notary at Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta

⁴ Lecturer at Faculty of Law Gadjah Mada University, Yogyakarta.